

RINGKASAN

Perusahaan telah melakukan segala upaya pencegahan guna meminimalisir terjadinya permasalahan yang merugikan perusahaan, namun tidak jarang permasalahan tersebut justru muncul akibat dari perbuatan pegawai/karyawan Perusahaan tersebut. Salah satu permasalahan yang dihadapi Perusahaan akibat dari perbuatan pegawai/karyawannya terjadi pada Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 554 PK/Pdt/2023. Permasalahan berawal ketika Budi Said (Penggugat) mengklaim telah membeli 7 ton emas PT Aneka Tambang Tbk (Tergugat I), dengan harga di bawah penawaran resmi. Transaksi pembelian emas dengan harga di bawah penawaran resmi tersebut pada awalnya berjalan dengan lancar, namun penerimaan emas batangan Antam mulai tidak lancar. Terhadap peristiwa tersebut, maka Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Surabaya Nomor Perkara 158/Pdt.G/2020/PN Sby demi mendapatkan hak atas kekurangan 1,136 ton emas dari total 7 ton tersebut.

Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam Tesis ini adalah bagaimana pertanggungjawaban PT Antam akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan karyawan dan penerapan asas itikad baik pembeli pada Putusan Mahkamah Agung No. 554 PK/Pdt/2023? Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan kasus (*Case Approach*), dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Tesis ini menggunakan sumber data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban PT Antam akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan karyawan telah memenuhi semua unsur sebagai majikan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdara. Penerapan asas itikad baik telah terpenuhi, karena sebelum terjadi kesepakatan jual beli, Penggugat selaku pembeli telah melakukan konfirmasi terhadap objek 7 ton emas tersebut dan memastikan bahwa emas tersebut sah secara hukum dan bukan merupakan hasil korupsi.

SUMMARY

The company has made every preventive effort to minimize the occurrence of problems that are detrimental to the company, but it is not uncommon for these problems to arise as a result of the actions of the company's employees. One of the problems faced by the Company as a result of the actions of its employees occurred in the Supreme Court Judicial Review Decision Number 554 PK/Pdt/2023. The problem started when Budi Said (Plaintiff) claimed to have bought 7 tons of gold from PT Aneka Tambang Tbk (Defendant I), at a price below the official offer. The gold purchase transaction at a price below the official offer initially went smoothly, but Antam's gold bullion receipts began to become unstable. Regarding this incident, the Plaintiff filed a lawsuit at the Surabaya District Court Case Number 158/Pdt.G/2020/PN Sby to obtain the right to the shortage of 1,136 tons of gold from the total of 7 tons.

The main problem in this thesis is how PT Antam is held accountable for unlawful acts committed by employees and the application of the principle of good faith of buyers in Supreme Court Decision No. 554 PK/Pdt/2023? This research uses a normative juridical method with a statutory approach, a case approach and a conceptual approach. This thesis uses secondary data sources in the form of primary legal materials and secondary legal materials.

The research results show that PT Antam's liability due to unlawful acts committed by employees has met all the elements as an employer as specified in Article 1367 paragraph (3) of the Civil Code. The application of the principle of good faith has been fulfilled, because before the sale and purchase agreement occurred, the Plaintiff as the buyer had confirmed the 7 tons of gold object and ensured that the gold was legally valid and not the result of corruption.